

Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jawa Tengah (Pelaksanaan Perpres Nomor 72 Tahun 2021)

Kurnia Lintang Larasati ^{1*}, Bambang Budi Raharjo ²

^{1,2} Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Alamat: Jl. Kelud Utara III No.15, Petompon, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50237

Korespondensi penulis: Kurnialintang000@students.unnes.ac.id*

Abstract. Central Java Province targets a 16% reduction in stunting by 2023, with the prevalence having been reduced from 31.2% in 2018 (Riskesdas, 2018) to 20.8% in 2022 (SSGI). The causes of stunting in Central Java include a lack of knowledge about balanced nutrition, proper parenting, and lack of access to proper drinking water and sanitation. This study aims to determine the implementation of the Central Java Provincial Health Office strategy in reducing stunting rates. The study used a qualitative design with descriptive methods and in-depth interviews, involving samples from the Health Office, TP-PKK, and Head of Puskesmas through snowball sampling techniques. The results showed that implementation at the Puskesmas level has not been optimal, with low community participation. Semarang City has many stunting reduction programs, in contrast to Brebes Regency. The overall provincial target has been achieved, but operational funding constraints hinder optimal program implementation.

Keywords: Implementation, Stunting, Policy.

Abstrak. Provinsi Jawa Tengah menargetkan penurunan stunting sebesar 16% pada tahun 2023, dengan prevalensi yang telah berkurang dari 31,2% pada 2018 (Riskesdas, 2018) menjadi 20,8% pada 2022 (SSGI). Penyebab stunting di Jawa Tengah mencakup kurangnya pengetahuan tentang gizi seimbang, pola asuh yang tepat, serta akses air minum layak dan sanitasi yang kurang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan strategi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam menurunkan angka stunting. Penelitian menggunakan desain kualitatif dengan metode deskriptif dan wawancara mendalam, melibatkan sampel dari Dinas Kesehatan, TP-PKK, dan Kepala Puskesmas melalui teknik snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi di tingkat Puskesmas belum maksimal, dengan partisipasi masyarakat yang masih rendah. Kota Semarang memiliki banyak program penurunan stunting, berbeda dengan Kabupaten Brebes. Target provinsi secara keseluruhan telah tercapai, namun kendala dana operasional menghambat pelaksanaan program secara optimal.

Kata kunci: Implementasi, Stunting, Kebijakan.

1. LATAR BELAKANG

Stunting menurut WHO (2015) adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi dalam waktu lama dan infeksi berulang, ditandai dengan panjang badan yang kurang dari standar usia. Periode 1000 hari pertama kehidupan penting karena stunting dapat berdampak jangka panjang pada perkembangan fisik, mental, intelektual, dan kognitif anak. Setelah anak berusia 5 tahun, stunting sulit diperbaiki dan dapat berlanjut hingga dewasa, bahkan meningkatkan risiko berat badan lahir rendah pada keturunannya (Gatica-Domínguez et al., 2019).

Stunting menjadi masalah global yang serius, termasuk di Indonesia yang masih memiliki prevalensi tinggi. Dampak stunting meliputi peningkatan morbiditas dan mortalitas (Priyono, 2020), perkembangan dan kapasitas belajar anak yang buruk, peningkatan risiko infeksi dan penyakit tidak menular di masa dewasa, serta berkurangnya produktivitas ekonomi (Ramadhan et al., 2022). Faktor penyebab stunting di Indonesia meliputi status gizi ibu, praktik menyusui, pemberian makanan pendamping, infeksi, pendidikan, sistem pangan, layanan kesehatan, serta infrastruktur air dan sanitasi (Tahangnacca et al., 2020).

Penurunan stunting adalah prioritas dalam Target Gizi Global 2025 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kedua, Nol Kelaparan. Prevalensi stunting anak di Indonesia tetap tinggi, sekitar 37% secara nasional (Dasman, 2019). Faktor-faktor penentu stunting di Indonesia mencakup pemberian ASI noneksklusif, status sosial ekonomi rendah, kelahiran prematur, panjang lahir pendek, dan rendahnya pendidikan ibu (Nugroho et al., 2021).

Pemerintah Indonesia berfokus pada 1000 hari pertama kehidupan anak untuk mengatasi stunting, dengan target penurunan prevalensi menjadi 14% pada 2024. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting menurun dari 30,8% pada 2018 menjadi 21,6% pada 2022. Namun, angka ini masih melebihi standar WHO sebesar 20%. Data SSGI 2022 menunjukkan 20,8% anak balita di Jawa Tengah mengalami stunting, dengan prevalensi tertinggi di Brebes (29,1%), Temanggung (28,9%), dan Magelang (26,8%), sementara Kota Semarang memiliki prevalensi terendah (10,4%) (Annur, 2023). Jawa Tengah berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 31,2% pada 2018 menjadi 20,9% pada 2021 (BPS, 2021) dan menargetkan penurunan menjadi 16% pada 2023 (Strakom Provinsi Jawa Tengah, 2023).

Implementasi kebijakan memerlukan kerja sama antar aktor dan organisasi untuk memastikan tujuan tercapai, sumber daya tersedia, dan konflik dikelola (Campos & Reich, 2019). Kasus stunting di Jawa Tengah bervariasi, dengan Kota Semarang menunjukkan keberhasilan melalui program sosialisasi aktif, sedangkan Kabupaten Brebes menghadapi hambatan partisipasi masyarakat. Dinas Kesehatan bertanggung jawab membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan, termasuk kebijakan, pelayanan, dan pencegahan penyakit (Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43, 2021).

Penelitian Sahroji et al., (2022) menunjukkan implementasi kebijakan dinas kesehatan dalam penanganan stunting belum optimal, dengan kurangnya dukungan masyarakat dan kesadaran terhadap lingkungan sehat. Penelitian Ramadhan et al., (2022) menunjukkan peran kader desa signifikan dalam menurunkan stunting, dengan kontribusi penurunan prevalensi sebesar 18,6% dalam setahun. Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk

menganalisis implementasi kebijakan dinas kesehatan berdasarkan PERPRES nomor 72 Tahun 2021 dalam menurunkan stunting di Jawa Tengah.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian yang dilakukan Sahroji et al., (2022) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dinas kesehatan dalam penanganan stunting belum berjalan optimal. Program-program yang sudah direncanakan dan disusun belum terlaksana semua sehingga target dan tujuan yang ingin dicapai tidak dapat berhasil optimal. Kebijakan dari dinas kesehatan juga kurang mendapat dukungan masyarakat sehingga pelaksanaan program belum dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, faktor yang menyebabkan kebijakan belum mencapai target adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sehat. Masyarakat belum mengaplikasikan apa yang diperoleh dari kegiatan program sehingga belum memberikan manfaat yang banyak dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan Ramadhan et al., (2022) yang menganalisis peran kader di tingkat desa untuk menurunkan stunting. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kader yang ada di tingkat desa mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam menurunkan tingkat stunting. Peran kader mampu menurunkan tingkat prevalensi stunting sebanyak 18,6% selama setahun. Masyarakat dihimbau untuk memberikan ASI kepada anaknya merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan kader. Program ini terbukti mampu menurunkan stunting yang ada di masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Dalam penelitian ini berupaya menjelaskan kejadian secara nyata yang ada di lapangan. Dan juga menyajikan melukiskan dengan nyata tentang apa yang sedang berjalan dari objek yang akan diteliti. Menurut Bogdan dalam buku Moleong (2018) mengungkapkan bahwa metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Puskesmas Gunungpati, TP-PKK Gunungpati pada waktu yang berbeda-beda dimulai dari 23 Februari 2024 – 23 April 2024.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi unsur pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam menurunkan angka stunting di Provinsi Jawa Tengah

Implementasi unsur pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam menurunkan angka stunting melibatkan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi dalam menjalankan mandat untuk mendukung pemerintah Kabupaten/Kota menerapkan Strakom Kabupaten/Kota secara efektif dan efisien. Implementasi peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 menekankan pentingnya koordinasi, pemantauan, dan evaluasi dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di tingkat pusat dan daerah, dengan membentuk tim percepatan yang terdiri atas pengarah dan pelaksana untuk mengoordinasikan dan mengevaluasi program secara efektif dan terintegrasi.

Dinas Kesehatan (Dinkes) bertanggung jawab atas intervensi spesifik seperti penyuluhan gizi, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, serta pemberian makanan tambahan (PMT). Dinkes juga bekerja sama dengan Puskesmas untuk melakukan pemantauan pertumbuhan anak dan memberikan intervensi langsung kepada anak yang terindikasi stunting. (Basrowi et al., 2022) menunjukkan bahwa intervensi spesifik dari sektor kesehatan memiliki dampak langsung terhadap penurunan angka stunting (Basrowi et al., 2022).

Implementasi program yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk menurunkan angka stunting di Provinsi Jawa Tengah

Program Dinas Kesehatan Jawa Tengah untuk menurunkan stunting mencakup edukasi gizi melalui media sosial dan penyuluhan langsung, pemberian makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil, serta intervensi seperti penyediaan jamban dan air bersih. Program ini mencakup siklus kehidupan manusia dari balita hingga remaja dan melibatkan intervensi individu serta komunitas. Implementasi program untuk percepatan penurunan stunting yang banyak programnya adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang. Kota Semarang memiliki banyak program yang digerakan untuk mengurangi atau menurunkan angka stunting yang ada di Kota Semarang khususnya. Program yang diterapkan atau dilaksanakan di Kota Semarang tidak ditemukan di Kabupaten Brebes.

Oktarina et al., (2022) mengatakan bahwa efektivitas program penurunan stunting sangat dipengaruhi oleh inovasi dan adaptasi program sesuai dengan kondisi lokal. Kota Semarang yang memiliki program inovatif seperti "Dahsyat" dan "Bapak Asuh Stunting" mampu menciptakan pendekatan yang lebih personal dan tepat sasaran, sehingga hasilnya lebih

optimal. Sebaliknya, Brebes yang kurang memiliki inovasi dalam programnya menunjukkan hasil yang kurang maksimal.

Implementasi pencapaian target atau kelompok sasaran yang ditetapkan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam menurunkan angka stunting di Provinsi Jawa Tengah

Penelitian menunjukkan bahwa program penurunan stunting di Jawa Tengah mengalami peningkatan signifikan dengan 30% lebih banyak balita yang menerima Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Partisipasi masyarakat juga tinggi dalam program penurunan stunting. Kelompok sasaran mencakup balita, remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0-59 bulan. Target nasional berdasarkan Perpres No.72 tahun 2021 adalah menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Implementasi Perpres No.72 tahun 2021 melibatkan koordinasi dan pemantauan yang sistematis. Di tingkat pusat, dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting yang mengoordinasikan dan mengevaluasi program secara efektif dengan melibatkan berbagai sektor.

Dalam konteks implementasi kelompok sasaran bukan hanya sekedar subjek tetapi menjadi pihak yang juga mampu mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (A. Saputra & Rulandari, 2020) menyatakan bahwa salah satu unsur core value dalam implementasi kebijakan terkait dengan pemahaman kondisi kelompok sasaran menjadi syarat dan ketentuan yang harus dijalankan, pernyataan tersebut bermakna bahwa kelompok sasaran semakin tinggi dalam ikut serta dalam partisipasi secara aktif dalam proses implementasi kebijakan. Seperti halnya didukung penelitian (Kusumaningsih et al., 2022) yang menyatakan bahwa kemitraan entitas pemerintah desa, organisasi desa, dan keterlibatan masyarakat merupakan kelompok sasaran yang memungkinkan bagi masyarakat yang terkena dampak.

Faktor pendorong dan faktor penghambat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk menurunkan angka stunting di Provinsi Jawa Tengah

Faktor pendorong dalam penurunan stunting di Jawa Tengah adalah semua pihak mau bergerak tidak hanya bidang kesehatan saja tetapi juga UPT lain diluar sektor kesehatan yang justru proporsinya itu lebih besar efeknya dalam penurunan stunting. Faktor penghambat pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Tengah adalah kendala dana operasional yang belum dapat memadai semua program. Hal ini menjadikan program yang ada belum terlaksana dengan maksimal dan hasil yang diharapkan belum sesuai dengan hasil yang diperoleh setiap evaluasi program.

Penelitian Saputra & Suryoto., (2022) mendukung bahwa program pencegahan stunting dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Strategi pelaksanaan kebijakan yang efektif harus mencakup koordinasi antar sektor, pemahaman yang baik tentang tugas masing-masing instansi, danelibatan aktif masyarakat. Dukungan teknis dan sumber daya yang memadai juga diperlukan untuk memastikan program dapat berjalan dengan baik (Meiyenti et al., 2023).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program stunting di Provinsi Jawa Tengah belum maksimal karena kurangnya partisipasi masyarakat dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan dinas-dinas di kabupaten/kota. Di tingkat kecamatan, pelaksana di Kota Semarang lebih partisipatif dibandingkan di Kabupaten Brebes. Program di Kota Semarang, seperti "Dapur Sehat" di Kecamatan Gunungpati, lebih bervariasi dan menarik bagi masyarakat dibandingkan dengan program di Kabupaten Brebes yang kurang inovatif. Program-program di Semarang, seperti "Pelangi Nusantara" dan "Tempat Penitipan Anak Rumah Pelita," menunjukkan hasil positif dalam mengurangi stunting. Namun, di Brebes, rendahnya partisipasi menyebabkan target program belum tercapai. Stunting membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk Dinas Kesehatan, CSR, organisasi profesi, dan institusi pendidikan. Di Brebes, partisipasi pelaksana masih rendah, sehingga diperlukan pelatihan untuk meningkatkan efektivitas program penurunan stunting.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan kunjungan kerja antar kota dan kabupaten untuk belajar dari kota dengan angka stunting rendah. Dinas Kesehatan Kota Semarang sebaiknya memberikan pembinaan intensif kepada keluarga yang mengalami stunting, melibatkan anggota keluarga, tokoh masyarakat, dan pihak terkait. Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes perlu membuat program yang menarik partisipasi masyarakat untuk menekan angka stunting. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga hasilnya tidak dapat diukur dengan angka dalam mengevaluasi ketercapaian program percepatan penurunan stunting di Jawa Tengah. Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas, peneliti dapat melakukan triangulasi data dengan berbagai sumber dan metode seperti wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Penelitian ini juga tidak mencakup seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan hanya dilakukan di Kabupaten Brebes, yang memiliki angka stunting tertinggi, dan Kota Semarang, yang memiliki angka stunting terendah. Untuk penelitian mendatang, disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan

menggunakan metode campuran kualitatif dan kuantitatif agar hasilnya lebih komprehensif dan terukur.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Puskesmas Gunungpati, dan TP-PKK Gunungpati yang telah memberikan izin penelitian, serta membantu selama proses penelitian berlangsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan lancar.

DAFTAR REFERENSI

- Annur, C. M. (2023). Kabupaten Brebes, wilayah dengan prevalensi balita stunting tertinggi di Jawa Tengah pada 2022. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/06/kabupaten-brebes-wilayah-dengan-prevalensi-balita-stunting-tertinggi-di-jawa-tengah-pada-2022#:~:text=Kabupaten%20Brebes%20merupakan%20wilayah%20dengan,yakni%20mencapai%209%2C1%25>.
- Basrowi, R. W., Dilantika, C., Sitorus, N. L., & Yosia, M. (2022). Impact of Indonesian healthcare worker in stunting eradication. Danone Specialized Nutrition Indonesia. In IJCOM (Vol. 2, Issue 2).
- BPS. (2021). Persentase balita pendek dan sangat pendek.
- Campos, P. A., & Reich, M. R. (2019). Political analysis for health policy implementation. *Health Systems and Reform*, 5(3), 224–235. <https://doi.org/10.1080/23288604.2019.1625251>
- Dasman, H. (2019). Dampak stunting bagi anak dan negara Indonesia. *The Conversation (Disiplin Ilmiah, Gaya Jurnalistik)*, 2–4. <http://repo.unand.ac.id/21312/1/Empat%20dampak%20stunting%20bagi%20anak%20dan%20negara%20Indonesia.pdf>
- Gatica-Domínguez, G., Victora, C., & Barros, A. J. D. (2019). Ethnic inequalities and trends in stunting prevalence among Guatemalan children: An analysis using national health surveys 1995-2014. *International Journal for Equity in Health*, 18(1), 110. <https://doi.org/10.1186/s12939-019-1016-0>
- Kusumaningsih, O., Saputra, A. S., Sutikno, C., & Mujib. (2022). Implementation of the Jogo Tonggo program in Karangangka village Kedungbanteng district Kabupaten Banyumas. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(02), 227–234.
- Meiyenti, S., Effendi, N., Djafri, D., & Devianto, D. (2023). Cultural perspective: Effective implementation of stunting management policy in West Pasaman Regency. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 25(2), 283. <https://doi.org/10.25077/jantro.v25.n2.p283-292.2023>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (38th ed.). PT Remaja Rosdakarya.

- Nugroho, M. R., Sasongko, R. N., & Kristiawan, M. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting pada anak usia dini di Indonesia. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 2269–2276. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.1169>
- Oktarina, S., Saiban, K., & Wahyudi, C. (2022). Innovation for handling stunting based on community empowerment in Gampong Ara, Kembang Tanjong sub-district, Pidie district, Aceh province of Indonesia (Study of policy implementation based on Pidie Regent Regulation Number 77 of 2017 about reduction in stunting). *International Journal of Research in Social Science and Humanities*, 03(03), 12–24. <https://doi.org/10.47505/ijrss.2022.v3.3.2>
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 10 6 (2021). https://jdih.jatengprov.go.id/inventarisasi-hukum/detail/pergub_43_th_2021
- Priyono, P. (2020). Strategi percepatan penurunan stunting perdesaan (Studi kasus pendampingan aksi cegah stunting di Desa Banyumundu, Kabupaten Pandeglang). *Jurnal Good Governance*, 16(2), 149–174. <https://doi.org/10.32834/gg.v16i2.198>
- Ramadhan, K., Entoh, C., & Nurfatimah, N. (2022). Peran kader dalam penurunan stunting di desa. *Jurnal Bidan Cerdas*, 4(1), 53–61. <https://doi.org/10.33860/jbc.v4i1.409>
- Riskesdas. (2018). Laporan Riskesdas 2018 Kementerian Kesehatan Jawa Tengah Republik Indonesia. In *Laporan Nasional Riskesdas 2018*.
- Sahroji, Q. N., Hidayat, R., & Nababan, R. (2022). Implementasi kebijakan dinas kesehatan dalam penanganan stunting di Kabupaten Karawang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(1). <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.1983>
- Saputra, A. S., & Suryoto. (2022). Implementation of stunting prevention policy in Banyumas Regency. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(03), 373–384.
- Saputra, A., & Rulandari, N. (2020). Analisis strategi peningkatan penerimaan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta tahun 2019. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 12–21.
- Strakom Provinsi Jawa Tengah. (2023). Pedoman strategi komunikasi perubahan perilaku dan sosial untuk pencegahan stunting di Jawa Tengah.
- Tahangnacca, M., Amiruddin, R., Ansariadi, & Syam, A. (2020). Model of stunting determinants: A systematic review. *Enfermería Clínica*, 30, 241–245. <https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.10.076>
- World Health Organization. (2015). Stunting in a nutshell. WHO. <https://www.who.int/news/item/19-11-2015-stunting-in-a-nutshell>